

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa negara di Asia masih banyak yang menangani permasalahan kemiskinan termasuk negara Indonesia sendiri. Dilansir dari kementerian keuangan tingkat kemiskinan terdapat penurunan di bulan Maret 2023 menjadi 9,36% dari yang sebelumnya mencapai 9,57% di bulan September 2022. Salah satu permasalahan kemiskinan ini masih dihadapi oleh negara Indonesia sampai sekarang, masalah kemiskinan sendiri merupakan masalah yang memiliki sifat multidimensional hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan di negara ini (Vita Ferezagia 2018). Penyebab terjadinya kemiskinan di Indonesia sendiri tidak jauh berbeda dengan negara lain yang bisa disebabkan oleh tingkat Pendidikan yang rendah, upah yang rendah bahkan tinggal di permukiman yang memiliki kualitas rendah, kurangnya jaminan pekerjaan. Sampai saat ini pemerintah telah berupaya melakukan program-program untuk mengatasi kemiskinan yang melanda negeri ini. Pemerintah mengentaskan tiga program yang dituju kepada penduduk miskin, meliputi: a) penyediaan kebutuhan pokok; b) mengembangkan sistem jaminan sosial; c) mengembangkan budaya usaha. Dalam meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan, presiden mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Pada negara berkembang sendiri masalah pendapatan yang rendah dan adanya kemiskinan merupakan masalah utama

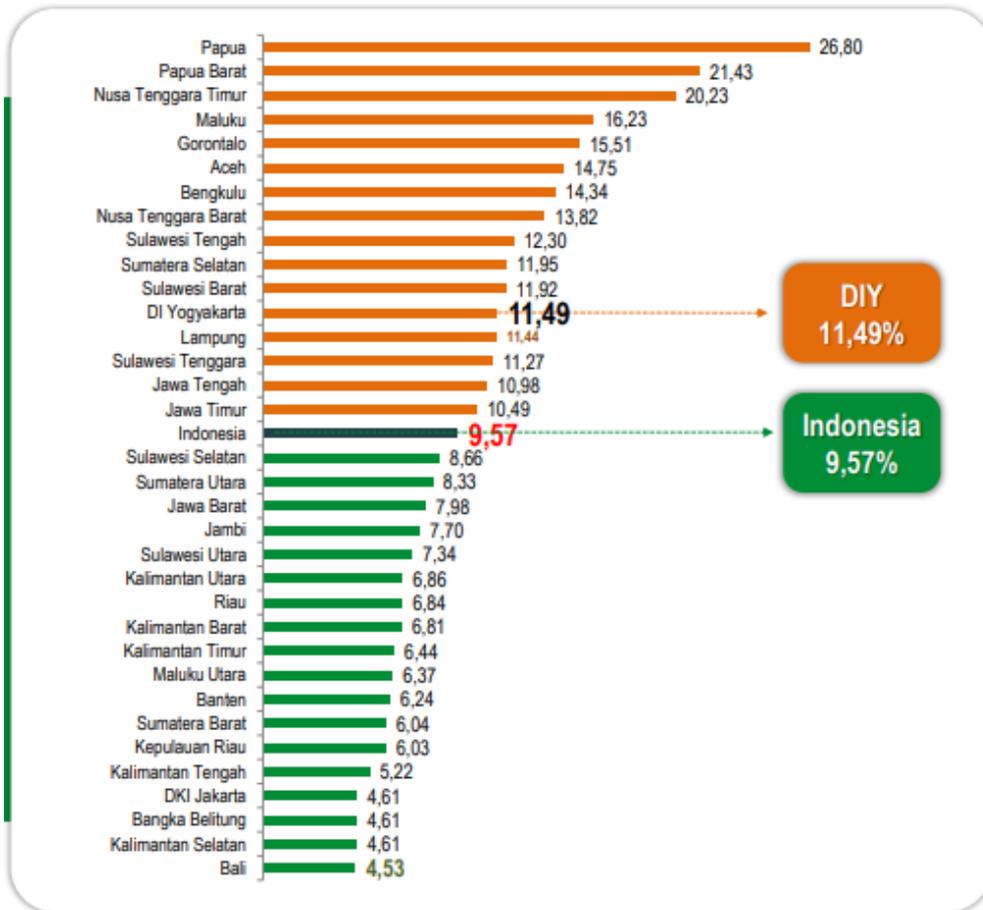
dalam pembangunan ekonomi (Ubur n.d.). Kondisi kemiskinan di Indonesia telah menjadi perhatian penting dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun ada sejumlah kemajuan dalam pengurangan kemiskinan, masih banyak masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit. Faktor yang memengaruhi kondisi kemiskinan di Indonesia mulai dari: a) terjadinya ketimpangan ekonomi yang signifikan hal ini disebabkan dari sebagian besar pendapatan terkonsentrasi di tangan Sebagian kecil populasi hal ini dapat menyebabkan kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. b) pengangguran dan ketidakpastian pekerjaan dapat meningkatkan resiko kemiskinan, banyak pekerja informal dengan upah rendah dan perlindungan sosial yang terbatas. c) akses dalam Pendidikan yang belum rata dan menyebabkan orang-orang dengan tingkat Pendidikan yang rendah lebih rentan terjebak dalam kemiskinan. d) kemiskinan di daerah pedesaan dimana banyak orang bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap perubahan cuaca dan harga komoditas. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan melalui program-program seperti Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), dan program pembangunan infrastruktur. Namun, upaya untuk mengatasi kemiskinan masih memerlukan kerja keras dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam kondisi kemiskinan di Indonesia.

Sesuai peraturan Menteri sosial No.2 tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif kepada kelompok usaha bersama untuk

penanganan fakir miskin. Peraturan ini mengatur berbagai aspek dalam bidang sosial, termasuk program-program pemberian bantuan sosial dan perlindungan sosial. Keberlakuan dan penguatan Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019 mencakup peraturan program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah, adanya perlindungan sosial bagi anak-anak, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Peraturan Menteri Sosial No. 2 Tahun 2019 adalah instrumen penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah sosial, mengurangi kemiskinan, dan melindungi kelompok yang rentan. Kepatuhan dan pelaksanaan yang baik terhadap peraturan ini sangat penting untuk memastikan bahwa program-program bantuan sosial berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, peraturan ini juga membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana sosial. Untuk menilai evaluasi efektivitas kebijakan dalam Permensos adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bantuan sosial dan perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini juga membantu dalam perbaikan dan penyempurnaan kebijakan yang ada serta pengembangan kebijakan baru yang lebih efektif.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di pulau jawa yang mencapai angka kemiskinan 11,49% pada September 2022 sedangkan presentase kemiskinan di kota jogja di atas rata-rata nasional dengan hasil 9,57% (lihat gambar 1.1). Hasil itu menunjukkan bahwa kemiskinan di kota

jogja sangat tinggi dibandingkan tingkat nasional, angka kemiskinan di DIY sendiri sampai saat ini masih menjadi perhatian besar bagi stakeholder pembangunan di DIY sendiri. Tercatat penduduk miskin di DIY pada September 2022 sebanyak 463.630 orang naik 8.900 ribu orang dibandingkan pada Maret 2022. Kemiskinan yang terjadi di Yogyakarta sendiri selalu meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2014-2022. Menurut data dari BPS sendiri pada 2022 tingkat kemiskinan paling tinggi berada di daerah Kulon Progo dan Gunung Kidul, dibandingkan dengan daerah Sleman dan Kota Yogyakarta sendiri. Ada beberapa hal penyebab terjadinya angka kemiskinan yang terjadi di DIY meliputi; adanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adanya kenaikan bahan pokok yang selalu meningkat, inflasi, rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP).



Gambar 1. 1 Perbandingan tingkat kemiskinan Nasional dengan Daerah Istimewa Yogyakarta

Rendahnya tingkat Pendidikan juga mempengaruhi karakteristik penduduk miskin yang ada di DIY, rendahnya keterbatasan lapangan pekerjaan pada sector formal hal ini berdampak pada pilihan lapangan pekerjaan yang mampu diakses masyarakat menjadi terbatas dan cenderung bergeser pada sektor informal sebagai contoh adalah pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima pun sangat mudah kita temukan di berbagai trotoar yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, adanya program pengkulangan di DIY sendiri sedang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat antara lain beasiswa bagi anak, RLTH per individu ataupun RLTH terintegrasi, KUBE,

penggunaan tanah kas desa bagi masyarakat kurang mampu sehingga salah satu kebutuhan papan pun bisa terpenuhi. Pengentasan kemiskinan pun harus didukung dengan proses pembangunan yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sendiri termasuk dari konsensus antara pemerintah (state actors) atau swasta (market) dan masyarakat sipil (civil society) yang mampu mewujudkan kebutuhan publik agar terciptanya masyarakat yang jauh dari kemiskinan (Dwi Purnomo, 2019).

Fenomena yang terjadi dalam mengurangi penduduk miskin terjadi juga di Kota Yogyakarta. Dikutip dari portal berita pemerintah kota Yogyakarta, salah satu program strategis kota Yogyakarta adalah pengentasan kemiskinan yang ditargetkan pada tahun 2024 presentase akan menurun secara signifikan. Dalam mewujudkan menurunnya angka kemiskinan Pemkot Yogyakarta merencanakan program penanganan berbasis wilayah yang melibatkan lima bidang meliputi; konsumsi atau pengeluaran, ketenagakerjaan, Pendidikan, Kesehatan, infrastruktur dasar dan ketahanan pangan. Pendapatan di kota Yogyakarta lebih memfokuskan pada masyarakat menengah keatas, diluar itu terdapat 40% masyarakat yang masih memiliki penghasilan rendah di kota Yogyakarta (Santiago, 2019). Adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Pemda) menghasilkan adanya transformasi otonomi daerah. Aturan Undang-Undang ini dijalankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah Kota Yogyakarta membuat program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengatasi terjadinya

kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

KUBE merupakan singkatan dari Kelompok Usaha Bersama. KUBE sendiri adalah kelompok yang mana anggotanya terdiri dari 7 hingga 15 orang atau bisa lebih. Program KUBE sendiri didirikan pada tahun 1982, pada tahun 2005 penyaluran bantuan KUBE memiliki sifat natural tanpa pendampingan hanya melalui perantara. Tetapi, mulai tahun 2006-2015 adanya perubahan yaitu adanya Kerjasama dengan pihak PT Bank Rakyat. Setelah perubahan tersebut sampai saat ini yang di damping dan diberikan pendampingan, adanya pembuatan laporan setiap perkembangan KUBE, adanya kelembagaan dalam KUBE dan sejak tahun 2015 sudah adanya pengupahan pada setiap pendamping KUBE oleh Kemensos baik tingkat desa maupun kecamatan. Tujuan didirikannya program KUBE untuk memperbaiki kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat baik secara aspek ekonomi maupun sosial. Sasaran KUBE sendiri untuk masyarakat yang memiliki berbagai keterbatasan penghasilan, Pendidikan, perumahan, keterampilan, hubungan sosial bahkan masyarakat yang memiliki keinginan untuk berkembang dan mandiri. Adanya pemberdayaan masyarakat miskin melalui adanya KUBE pada dasarnya sebuah pemikiran bahwa setiap orang memiliki potensi dan kemampuan yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan melalui KUBE diharapkan dapat mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap anggota KUBE (Yuliarti I, 2019).

Program KUBE dilaksanakan oleh pemerintah Yogyakarta mulai dari lingkup perkotaan hingga lingkup pedesaan. Di kota Yogyakarta sendiri terdapat 362 KUBE yang terbentuk dan masih berkegiatan. Pada tahun 2022 Dinas Sosial DIY mengalokasikan bantuan modal pengembangan kepada 10 KUBE di Kota Yogyakarta. Setiap KUBE mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp. 23.000.000,- yang diterima satu kali. 10 KUBE yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial telah melalui proses verifikasi dan validasi yang sudah didampingi untuk memastikan seluruh anggota KUBE masih aktif sampai saat ini. Salah satu kelurahan yang mendapatkan bantuan Dinas Sosial di Kota Yogyakarta ialah KUBE PKH Sejahtera XVII YKKT 003 Suryodingratan Mantrijeron. Jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Suryodiningratan berjumlah 241 peserta, dengan jumlah peserta awal 277 peserta. Terdapat peserta yang mengalami graduasi alami dengan jumlah 30 peserta dan graduasi mandiri sejumlah 6 peserta. Rekapitulasi Komplementaritas PKH Kelurahan Suryodiningratan terbagi menjadi 4 kategori. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berjumlah 213 Peserta, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Jasa E-Warung 1 kelompok, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH 3 kelompok, serta tidak dapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 64 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana cara meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin di Kelurahan Suryodingratan dan tantangan yang harus dihadapi oleh KUBE dalam berbagai rintangan melalui 4 kategori baik melalui E-Warung, PKH, bantuan Non-tunai, dan yang tidak mendapatkan BPTN. Maka dari itu, penelitian meremuskan judul “Implementasi Permensos No 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Usaha Ekonomi

Produktif pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Suryodingratan
Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Permensos No 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Suryodingratan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta?
2. Faktor apa saja yang berpengaruh pada implementasi Permensos No 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Kelurahan Suryodingratan Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi implementasi kebijakan permensos No 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif pada kelompok usaha Bersama (KUBE) di kelurahan suryodingratan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui apa saja Faktor apa saja yang berpengaruh pada implementasi permensos No 2 Tahun 2019 tentang bantuan sosial usaha ekonomi produktif pada kelompok usaha Bersama (KUBE) di kelurahan suryodingratan.

D. Manfaat Penelitian

Adanya manfaat dari penelitian ini, maka penelitian menghasilkan:

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan untuk memperluas

pengetahuan mengenai penjabaran teori dan konsep yang di dapat selama perkuliahan. Teori dan konsep yang dijabarkan mengkasi mengenai mengimplemntasikan terkait kebijakan publik, penelitian ini memberikan wawasan pengetahuan bagi pembaca.

4. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat menjadi saran untuk pemerintah kota Yogyakarta dan pihak berwenang dalam melaksanakan program KUBE pada tahun berikutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam mendukung penelitian ini penulis memberikan pemahaman serta menegaskan bahwa masalah yang mencakup mengenai implementasi Permensos No 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penelitian melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini.

No	Nama Penulis	Judul	Nama Jurnal	Hasil Temuan
1	(Haris and Vol 2014)	Memahami pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan media	Jupiter	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai baik dan cocok untuk diterapkan, pendekatan tersebut menciptakan perubahan bagi masyarakat tapi bukan berarti menghilangkan sama sekali nilai budaya lokal yang selama ini menjadi faktor perekat solidaritas sosial diantara sesama warga masyarakat karena tidak semua individu yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki kompetensi yang sama maka pendekatan yang digunakan haruslah bisa mengakomodasi
2	(Haryati R n.d. 2013)	Kebijakan penanganan kemiskinan melalui kelompok usaha Bersama (KUBE)	Socio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial	Hasil penelitian ini menunjukan kriteria sasaran program belum mengacu pada Kriteria dari BPS (14 kriteria Penduduk miskin) dan kriteria Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah (KPKD). Pada Tataran proses pelaksanaan, belum seluruh tahapan dilaksanakan secara runtut. Setiap lokasi menggunakan Panduan berbeda. Pemilihan pendamping dan mekanisme pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah belum mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

3	(Hamid and Susilo 2011)	Strategi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Jurnal Ekonomi Pembangunan	Hasil penelitian ini menunjukkan diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM di DI Yogyakarta pada dasarnya adalah percepatan transformasi UMKM dari fase formasi menuju fase stabilisasi. Dalam rangka pengembangan UMKM tersebut, maka direkomendasikan berbagai kebijakan dan strategi
4	(Aprilia nti Laras, 2019)	Menakar keberlanjutan program KUBE: peluang dan tantangan program KUBE dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta	Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial	Hasil penelitian ini menunjukkan faktor internal kelompok berpengaruh besar bagi keberlanjutan KUBE. Empat KUBE berkelanjutan memiliki faktor internal yang kuat. Hal ini tercermin dari tingginya komitmen anggota dalam menjalankan peraturan kelompok. Sebaliknya, faktor internal pada kedua KUBE mati lemah karena anggota tidak menjalankan kesepakatan kelompok. Disamping itu, peran pendamping KUBE dari Dinas Sosial kurang optimal dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kedua KUBE mati.
5	(Noor 2011)	Pemberdayaan Masyarakat	Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai model pembangunan yang berbasis rakyat, menggerakkan partisipasi masyarakat bukan hanya essensial untuk mendukung kegiatan pembangunan yang digerakkan pemerintah, tetapi juga agar masyarakat berperan lebih besar dalam kegiatan yang dilakukannya sendiri.

6	(Panglima Saragi, 2015.)	Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya, dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah DIY juga perlu melindungi si miskin dari ketidakberdayaannya dan mengidentifikasi serta mengembangkan potensi ekonomi lokal dan usaha-usaha produktif dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita mereka. Koordinasi kebijakan dan program antara pusat dan daerah yang baik sangat membantu dalam mengentaskan kemiskinan di DIY ke depan.
7	(Bakri La Suhu, 2017)	Analisis Program Perekonomian dan Penanggulangan Kemiskinan	Ejournal KAWASA	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya gotong royong masyarakat Desa Kembangsono Trimulyo dan Dusun Bulu Trimulyu Jetis Bantul dari aspek sosial sangat positif karena untuk mempererat tali solidaritas diantara masyarakat. Namun, disisi lain, budaya gotong royong dapat mempengaruhi pendapatan para pengrajin pembatik dan para pencari barang rongsokan, karena rata-rata pendapatan tidak sesuai dengan harapan.
8	(Isti'ana Yuliarti . 2019)	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jawa Tengah	Jurnal Masyarakat Madani	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap penyadaran yang dilakukan dengan sosialisasi dan pembuatan FGD untuk berdiskusi, tahap identifikasi kebutuhan dan perencanaan yang dilakukan bersama-sama oleh anggota agar

				anggota KUBE mengetahui apa saja yang nantinya akan dilakukan dalam program tersebut.
9	(Yasin, 2015.)	Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Jurnal Administrasi Publik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KUBE di desa kuala memiliki potensi, yang terdiri dari Cateringan, Perbengkelan, dan pertukangan meubel. Tetapi yang paling menonjol dan aktif sampai dengan saat ini adalah cateringan
10	(Pratiwi Kurnia wati, Supriyono, and Hanafi, 2013.)	Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)	Jurnal Administrasi Publik (JAP)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Oleh sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan.
11	(Zulkarnain, Heriyanto, and Yuliani 2020)	Implementasi program kelompok usaha Bersama (KUBE) dalam pemberdayaan fakir miskin	Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul (JSDMU)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Masyarakat Miskin, dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Miskin Provinsi Riau Ada beberapa indikator yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat faktor ini penting karena dapat menentukan keberhasilan melaksanakan program KUBE.

12	(Pakistani et al. 2019)	Implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program usaha bersama (KUBE)	Respon Publik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kelompok usaha bersama di kota Probolinggo mulai dilaksanakan pada tahun 2016. Sejak tahun itu, jumlah KUBE meningkat seiring dengan adanya sosialisasi dari Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial terkait. Implementasi program ini dimulai dengan adanya suatu analisis tentang bagaimana kondisi kemiskinan yang ada di wilayah tersebut dalam kasus ini adalah wilayah Kota Probolinggo. Dalam perkembangan KUBE di wilayah ini telah tercipta sebanyak 30 KUBE dengan kegiatan yang beragam.
13	(Anggraini and Roeliana 2022)	Evaluasi program e-warung KUBE PKH berdasarkan permensos RI Nomor 8 tahun 2017 dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kota Bengkulu	Jurnal Governance Dan Administrasi Publik	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aspek input, yaitu sumber daya manusia, dana dan bangunan, Aspek Process yakni ketepatan tata cara pembentukan E-Warung KUBE PKH dan proses operasional E-Warung KUBE PKH, Aspek Output yakni penilaian hasil terhadap keaktifan anggota E-Warung KUBE PKH dan Aspek Outcomes yakni dampak dari terkena kebijakan tersebut ternyata belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat berbagai permasalahan didalam pelaksanaan E-Warung KUBE PKH.
14	(Tami Astari Zulkarnain. 2020)	Analisis efektifitas kelompok usaha Bersama sebagai instrument program penanganan fakir miskin	Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan sebanyak 15 Karya tulis ilmiah, yang terdiri dari KTI dalam jurnal sebanyak 7 buah, KTI dalam bentuk buku (7 buah) dan dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi (4 buah). Selain itu data berasal dari laporan hasil evaluasi KUBE yang dilakukan penulis di Kabupaten Katingan pada bulan

				Mei 2015. Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa eksistensi KUBE dilapangan tidak bertahan lama, usaha yang dibangun tidak berkembang. KUBE kurang atau tidak cukup efektif sebagai instrument penanganan fakir miskin.
15	(Nurma yanti S, 2020.)	Pembentuk Usaha Bersama (KUBE) Berbasis Potensi Lokal Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi lokal masyarakat adalah di bidang anyaman rotan dan ketak. Ketrampilan menganyam ini di miliki oleh kaum perempuan Desa Saba sebagai ketrampilan turun temurun namun belum dilakukan secara professional.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas menjelaskan mengenai proses pemberdayaan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama. Perlu melakukan perbedaan dalam melakukan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Seperti (Thalha et al. n.d.) dan (Anggraini and Roeliana 2022) yang membahas lebih kearah potensi lokal masyarakat tanpa menjelaskan melalui melalui Permensos No 2 Tahun 2019. Sehingga penelitian ini memiliki kebaruan dalam hal penelitian ini.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam seluruh proses kebijakan karena kebijakan publik yang sudah dilakukan telah dibuat akan bermanfaat jika diimplementasikan. Program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang ingin dicapai. Implementasi sendiri dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang dilakukan mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Di dalam implementasi kebijakan aktor, organisasi, prosedur dan Teknik dipakai secara Bersama dan simultan.

Secara umum implementasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1990:327). Istilah implementasi dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu Kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan tujuan atau target-target yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah diimplementasikan. Pengertian Implementasi kebijakan adalah tindakan- tindakan yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintah baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2005:65).

Perumusan lebih rinci mengenai kebijakan sebagaimana dikutip oleh Winarno bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat/ tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan sekalipun implementasi kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.” (Edward III dalam Winarno, 2007:174).

Untuk administrasi publik dan kebijakan publik, studi implementasi kebijakan sangat penting. Tahap implementasi kebijakan terjadi antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat menyelesaikan masalah yang dimaksudkan, maka kebijakan itu mungkin mengalami kegagalan meskipun dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang juga mungkin mengalami kegagalan jika para pelaksana kebijakan tidak menerapkannya dengan baik.

Menurut Teori George C. Edwards III (dalam Riant Nugroho, 2009:636) Dalam pandangan, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Variabel Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

- a. Transmisi: maksudnya dalam komunikasi sering terjadi salah pengertian (miskomunikasi) hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengahjalan.
- b. Kejelasan : komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah

jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua).

- c. Konsistensi : perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan) karena jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

Variabel Sumber daya penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup:

- a. Staf. Dalam implementasi kebijakan harus ada ketepatan atau kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang harus dimiliki dengan tugas yang akan dikerjakan.
- b. Informasi. Informasi ini harus relevan dan memadai tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.
- c. Wewenang. Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
- d. Fasilitas. Selanjutnya adalah fasilitas atau sarana yang digunakan untuk mengoperasionalkan implementasi suatu kebijakan yang meliputi : dana untuk membiayai operasionalisasi implementasi kebijakan tersebut, gedung, tanah, sarana dan prasarana yang kesemuanya akan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan.

Disposition berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi:

- a. Pengangkatan birokrat: dalam artian pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Insentif: dalam artian memanipulasi insentif dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah kebijakan dengan baik. Hal ini dilakukan dalam sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. walaupun variabel lainnya sudah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan. Namun karena struktur birokrasi yang lemah. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menghambat jalannya kebijakan. Struktur birokrasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan suatu kebijakan, tanpa didukung dengan struktur birokrasi yang baik, kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan maksimal. Struktur birokrasi berupa adanya koordinasi yang baik antara

instansi- instansi terkait dalam melaksanakan suatu kebijakan serta pengelolaan kegiatan mulai dari pembuatan kebijakan sampai pada para pelaksana dilapangan.

Implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kepatuhan kelompok sasaran kebijakan. Oleh karena itu, dilihat dari perspektif perilaku, kepatuhan kelompok sasaran merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Ripley dan Franklin (1986: 12) bahwa untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu didasarkan padatiga aspek, yaitu:

- 1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang,
- 2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta
- 3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program terarah. Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program. Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Korten dan Syahrir (1980) bahwa keefektifan kebijakan atau program tergantung pada tingkat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, kesesuaian program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian program kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana (Besar 2010).

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, faktor pendukung implementasi kebijakan:

- a. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.

- b. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- c. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- d. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- e. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- f. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- g. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- h. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Selain itu, adanya faktor penghambat yang dalam implementasi kebijakan:

- a. Isi kebijakan, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci.
- b. Informasi, Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik.
- c. Dukungan, Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
- d. Pembagian potensi, berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi.

2. Usaha Ekonomi Produktif

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh Rumah Tangga atau Kelompok Usaha Ekonomi seperti Poktan, Gapoktan, Koperasi, Koperasi Tani, atau KUD. Tujuan utama dari UEP adalah meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif adalah upaya pemberdayaan masyarakat melalui bantuan modal usaha untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif, serta memberikan dukungan modal untuk membeli alat pengolah organik (APO). Harapannya, hal ini akan meningkatkan ketersediaan pangan bagi rumah tangga yang rentan terhadap kekurangan pangan atau masyarakat miskin di pedesaan dan perkotaan pada tahun 2009 di 26 Kabupaten/Kota.

Maksud dari Pengembangan dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah mendorong peningkatan aktivitas dan kreativitas usaha di kalangan kelompok masyarakat yang berada di Daerah Rawan Miskin. Adapun tujuan dari kegiatan UEP meliputi: 1) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat; 2) Menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan semangat kewirausahaan; 3) Mengembangkan usaha berbasis potensi lokal; 4) Meningkatkan pendapatan; dan 5) Meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan stok pangan lokal (Cadangan Pangan).

Banyak upaya telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya adalah melalui pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kondisi miskin, sering kali tergantung pada kerjasama dalam kelompok. KUBE telah

menjadi salah satu inisiatif yang sangat dikenal sebagai lambang dan program unggulan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, terutama dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. KUBE berfungsi sebagai platform bagi warga miskin yang memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerja sama dalam kelompok (dita, 2016).

Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE dilakukan dengan memberikan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada kelompok tersebut. Bantuan ini ditujukan agar KUBE, yang terbentuk dari beberapa Keluarga Binaan Sosial (KBS), mampu menjalankan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) guna mencapai kemandirian usaha serta meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitarnya. Kegiatan yang dilakukan oleh KUBE mencakup pelatihan keterampilan berusaha, pemberian bantuan modal kerja atau usaha, serta pendampingan untuk mencapai tujuan tersebut (Utami, 2016)

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah suatu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Program UEP merupakan salah satu jenis Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat atau kepada Kelompok Usaha Bersama yang dikenal sebagai KUBE. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan mengurangi tingkat kemiskinan sebagai wujud kepedulian dari pemerintah (Purnama, 2017)

KUBE adalah singkatan dari Kelompok Usaha bersama. KUBE merupakan bentuk kelompok dimana anggotanya terdiri dari 7 sampai 15 orang dan bahkan bisa mencapai 100 orang. KUBE sendiri didirikan pada tahun 1982, pada tahun 2005 penyaluran KUBE bersifat natural, melalui perantara, memiliki sifat top down dan

tidak didampingi. Pada tanggal 2006-2015 dilakukan perubahan dengan bekerja sama dengan PT Bank Rakyat (Yuliartati, 2019).Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan media untuk membangun kemampuan memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, melaksanakan peran sosial dengan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga miskin yang membahas mengenai aspek sosial dan ekonomi (Rahmayuni, 2019).

Program kelompok usaha Bersama (KUBE) menjadi salah satu program pemerintahan dibawah pengawasan Kementerian Sosial RI khususnya Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan peraturan dirjen penanganan fakir miskin nomor 38/PFM/SK/HK.01/06/2016. Dengan upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian modal usaha, dengan adanya KUBE dapat mengurangi angka kemiskinan (Aprilianti, 2019.)

Program KUBE merupakan program alternatif kementerian sosial Republik Indonesia yang bisa mencapai penghapusan kemiskinan. KUBE diberi bimbingan selama satu tahun untuk mengelola usaha secara bersamaan. Kelompok Usaha Bersama adalah kelompok binaan departemen sosial yang dibentuk dari keluarga binaan sosial (KBS), usaha ekonomi produktif (UEP), usaha kesejahteraan sosial (UKS) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial anggotanya dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya (Haryati, 2013).

Indikator kelompok usaha bersama (KUBE) dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan sifat kelompok tersebut. Kelompok usaha bersama adalah suatu bentuk organisasi di mana individu atau entitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Berikut adalah beberapa indikator umum yang dapat digunakan untuk menilai kinerja atau keberhasilan kelompok usaha bersama:

a) Produktivitas:

Output atau hasil kerja yang dihasilkan oleh kelompok dapat menjadi indikator utama. Hal ini dapat diukur dalam bentuk produksi barang atau jasa, tingkat efisiensi, atau peningkatan produktivitas.

b) Pendapatan dan Keuntungan:

Pertumbuhan pendapatan dan keuntungan kelompok dapat mencerminkan keberhasilan usaha bersama. Ini dapat dilihat dari peningkatan penjualan, margin keuntungan, atau diversifikasi produk/jasa.

c) Partisipasi Anggota:

Tingkat partisipasi anggota dalam keputusan dan kegiatan kelompok dapat menjadi indikator keberhasilan. Semakin tinggi partisipasi anggota, semakin kuat kelompok tersebut.

d) Peningkatan Kapasitas:

Kemajuan dalam peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas anggota kelompok dapat dianggap sebagai indikator positif.

e) Peningkatan Kesejahteraan Anggota:

Perbaikan dalam kondisi sosial dan ekonomi anggota kelompok, seperti akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan perumahan, dapat diukur sebagai keberhasilan.

KUBE di dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, berdampak dengan meningkatnya pendapatan keluarga; meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan; meningkatnya kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya. KUBE memberikan program untuk bisa memenuhi tujuan dengan upaya mempercepat penghapusan melalui:

- a) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota KUBE secara bersama dalam kelompok.
- b) Peningkatan pendapatan atau peningkatan kemampuan anggota kelompok KUBE didalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari ditandai dengan meningkatkan pendapat keluarga, meningkatkan kualitas pangan, sandang, papan kesehatan tingkat pendidikan; dapat melaksanakan kegiatan keagamaan; dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan kebutuhan social lainnya.

- c) Pengembangan usaha
- d) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota KUBE dan dengan masyarakat sekitar atau meningkatkan kemampuan anggota kelompok KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya, ditandai dengan semakin meningkatnya kepedulian dan rasa tanggung jawab dan ikut sertaan anggota dalam usaha kesejahteraan sosial yang ada dilingkungannya (Wardianti, 2019.)

G. Definisi Konseptual

5. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah atau lembaga lainnya untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri, implementasi kebijakan melibatkan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

6. Usaha Ekonomi Produktif

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, atau kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. UEP ini dapat melibatkan berbagai jenis usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan,

industri kecil, jasa, hingga perdagangan. Tujuan utama dari UEP adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

H. Definisi Operasional

No	Variabel	Indikator	Parameter
1	Implementasi Kebijakan	Komunikasi	Kemudahan dalam berkomunikasi, kehadiran digital.
		Struktur Birokrasi	Adanya SOP yang berjalan.
		Sumber Daya	Berwujud manusia, kompetensi implementor.
		Disposisi	Komitmen, jujur, tanggung jawab

Tabel 1. 2 Definisi Operasional

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Program usaha bersama kelompok (KUBE) dalam implementasi Permensos No 2 Tahun 2019 tentang Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Metode deskriptif ini sesuai dengan tujuan penulis melakukan penelitian ini, yaitu menggambarkan serta menjelaskan dengan rinci kondisi yang sedang berlangsung selama penelitian dilakukan ditengah masyarakat dan pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Kelurahan Suryodingratan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil fokus pada Kemantren Mantrijeron dan studi

kasusnya berada pada Kelurahan Suryodingratan. Selain itu, peneliti melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang berada pada Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data Sekunder atau data pendukung dengan tujuan melengkapi data primer yang sudah digunakan pada penelitian ini yang berasal dari berita online yang ada di website dan penjelasan dari beberapa artikel jurnal yang sudah dicari penulis.

a. Data Primer

Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara Bersama Pengelola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan masyarakat setempat.

b. Unit Analisis

Unit analisis adalah objek yang menjadi fokus atau subjek utama penelitian. Unit analisis sangat penting dalam penelitian karena menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Unit analisis tidak boleh diisolasi menjadi variabel atau hipotesis, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan yang membahas mengenai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian hal ini berupa individu, benda, kelompok, organisasi, bangsa, fenomena sosial.

Individu: Unit analisis yang paling lazim dalam riset bisnis adalah individu. Peneliti mungkin tertarik untuk melihat ke dalam tindakan karyawan, persepsi, sikap, atau pendapat.

Kelompok: Unit analisis yang terdiri dari beberapa individu yang memiliki karakteristik atau tujuan yang sama

Organisasi: Unit analisis yang terdiri dari beberapa kelompok atau individu yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data relevan yang ada dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi dan wawancara secara mendalam kepada pengelola dan anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

1) Observasi

Observasi merupakan Teknik dalam pengumpulan data melalui penelitian kualitatif. Penulis mengamati secara langsung terhadap objek atau subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang tepat dan sesuai, observasi ini dapat bersifat partisipatif atau non-partisipatif. Penelitian ini meneliti kondisi lingkungan di Kelurahan Suryodingratan. Sehingga penelitian ini, akan melihat secara langsung bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam mensukseskan program Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Suryodiningratan. Hasil yang ditemukan pada Kelompok Usaha Bersama Kelurahan Suryodingratan masih ada Kelompok Usaha Bersama yang belum mengerti pentingnya program Ber-KUBE, berbagai macam usaha yang dikembangkan oleh anggota Kelompok Usaha Bersama mulai dari membuka pada bidang kuliner, tempat sembako, dan usaha eco print.

2) Wawancara

Wawancara merupakan Teknik dalam pengumpulan data melalui penelitian kualitatif. Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan individu maupun kelompok, wawancara ini dapat bersifat terstruktur atau tak terstruktur. Peneliti mewawancarai 5 narasumber yang diantaranya adalah 2 pendamping kelompok usaha bersama, 1 pekerja dinas sosial, 1 anggota kelompok usaha bersama, dan 1 anggota program keluarga harapan yang bekerja di Kelurahan Suryodiningratan.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari obyek yang diteliti (Thalha, 2019.). di dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan dari hasil wawancara yang didapat, mendokumentasikan dengan foto salah satu usaha eco-print dan membuka toko sembako yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama.

5. Teknik Analisis Data

a. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dan reduksi data. Informasi yang diperoleh melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan pengelola Kelompok Usaha Bersama. Untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi

yang didapatkan dibuat secara rinci dan ringkas.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk naratif dengan uraian verbal mengenai tema penelitian. Setelah data terkumpul dan dispesifikasikan, penyajian data berupa laporan. Penyajian data dalam penelitian ini dapat memudahkan pemahaman penulis terhadap temuan penelitian yang merupakan hasil observasi dan wawancara dengan Pengelola Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan pengelola Kelompok Usaha Bersama.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada tahap terakhir penelitian, merupakan upaya menyimpulkan komponen data yang sudah terkumpul dengan informasi yang sudah dikumpulkan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Peneliti dapat mencermati mengenai pola, penjelasan konfigurasi dan hubungan sebab-akibat dalam mengambil kesimpulan dari “Program Usaha Bersama Dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Studi Kasus Kelurahan Suryodingratan”.

d. Keabsahan Data

Keabsahan data dihasilkan dari adanya triangulasi, triangulasi sendiri pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika

didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda (Rahardjo, 2010).